

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, literasi keuangan telah mendapat perhatian khusus. Orang-orang tertarik mempelajari pentingnya literasi keuangan terutama setelah Krisis keuangan Asia pada tahun 1998, krisis keuangan global tahun 2008 dan Euro-Pean Sovereign debt crisis 2012 (Yong et al. 2017). Bukan hanya individu, tetapi literasi keuangan juga menjadi perhatian bagi pemerintah, bank, yeas, kelompok masyarakat, pasar keuangan dan organisasi lain, khususnya di negara berkembang (Hassan Al-Tamimi dan Anood Bin Kalli 2009). Ini membuktikan bahwa melek finansial tidak hanya penting bagi individu tetapi juga penting di tingkat bisnis (Firli 2017). Sebagian besar negara menganggap Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) adalah aktor utama untuk pembangunan nasional dan regional terutama di bidang ekonomi (Rashid dan Al-shami 2018). Hal ini diakui oleh dunia karena memiliki kontribusi yang signifikan di bidang sosial-ekonomi seperti: menciptakan lapangan kerja, mempromosikan ekspor, menghasilkan output, dan mendorong orang untuk menjadi wirausahawan (Hidayet Keskin, Canan Senturk, Onur Sungur 2010). Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi 45% dari total pekerja dan 33% dari total pendapatan nasional dalam pembangunan negara (George Candiya Bongomin Okello, Joseph Mpeera Ntayi, John C Munene 2017). Dibandingkan dengan perusahaan berskala besar, UKM memiliki struktur mic karena mereka harus lebih berinovasi, memiliki strategi untuk masuk memasarkan, menghasilkan barang berkualitas baik dan lebih responsif terhadap konsumen.

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memperoleh, memahami dan mengevaluasi informasi keuangan. terkait dengan pengambilan keputusan dan siap menerima konsekuensi dari keputusan diambil (George Candiya Bongomin Okello, Joseph Mpeera Ntayi, John C Munene 2017). Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan (OECD), literasi keuangan adalah kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap,

dan perilaku dalam membuat keputusan untuk mencapai keuangan yang baik sedang (Atkinson dan Messy 2012). Karena pentingnya literasi keuangan untuk individu, bisnis dan komunitas, perlu untuk mengembangkan strategi di setiap level.

Di sisi lain, UMKM juga memiliki risiko. Pertumbuhan UMKM yang relatif cepat, hubungan dengan bank yang tidak berkembang dengan baik, dan arus kas kecil di perusahaan menyebabkan beberapa lembaga keuangan yang memberikan pinjaman akan menetapkan spesifik batas yang kemudian dapat berdampak pada peningkatan biaya (Al-Shami et al. 2017; Al-shami, Muhammad, dan Rashid 2018; Ardic, Mylenko, dan Saltane 2011; Samer et al. 2015).

Peran sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) diyakini mampu menggerakkan perekonomian suatu negara (Audretsch, et al., 2009; Carter, & Evans, 2010). Hal ini senada dengan survey yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan kontribusi sektor UMKM di Indonesia terbukti sangat signifikan bagi perekonomian nasional dengan menyumbang 60% Produk Domestik Bruto dan menyerap 97% tenaga kerja nasional (Siaran Pers OJK: SP-38/DKNS/OJK/5/2016). Secara nyata, UMKM menyumbang dalam mengurangi jumlah kemiskinan dengan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat (Adomoko, et al., 2016). Pentingnya peranan sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian tersebut mengharuskan dilakukannya penguatan kapasitas UMKM. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan serta memperluas akses keuangan bagi UMKM. Selain itu UMKM sering mengalami keterlambatan dalam pengembangannya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas (closed loop problems), seperti masalah kapasitas SDM, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, sehingga UMKM sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar (Abor dan Quartey, 2010).

Permasalahan tentang UMKM salah satunya tidak memiliki informasi keuangan yang transparan dan terorganisir disebabkan minat yang rendah

UMKM untuk mencatat dan membukukan setiap transaksi yang telah dilakukan UMKM, temuan ini serupa dengan penelitian yang dilakukan (Masitoh dan Widayanti, 2015), dari sektor UMKM batik yang ada di Surakarta, ditemukan UMKM belum melakukan pencatatan atau pembukuan, hanya sebagian kecil terutama pedagang batik yang penjualannya sudah di luar Surakarta bahkan sampai ekspor, sedangkan yang belum melakukan, transaksi hanya tercatat dalam tumpukan nota sehingga pihak owners sulit mengetahui pemantauan terhadap perkembangan usahanya. Selain itu pihak perbankan yang berperan dalam akses modal juga kesulitan dalam meminimalisir risiko default atas kredit yang dapat disalurkan kepada UMKM. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian di beberapa negara, seperti Brazil, Peru, dan sejumlah negara di Afrika Selatan (Cravo, et al, 2010; Falkena, Hans, et al, 2008).

Di Indonesia sendiri, literasi keuangan telah menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan. Terdapat kekhawatiran bahwa masyarakat cenderung kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk mengelola dan membuat keputusan keuangan dimasa yang akan datang. Dengan adanya perhatian khusus terhadap literasi keuangan ini, diharapkan masyarakat lebih berpengetahuan, berkemampuan dan memiliki keterampilan dalam mengelola dan membuat keputusan keuangan dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi pada kestabilan sistem keuangan dan dapat mengurangi kerentanan pada sistem keuangan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, literasi keuangan telah menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan. Terdapat kekhawatiran bahwa masyarakat cenderung kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk mengelola dan membuat keputusan keuangan dimasa yang akan datang. Dengan adanya perhatian khusus terhadap literasi keuangan ini, diharapkan masyarakat lebih berpengetahuan, berkemampuan dan memiliki keterampilan dalam mengelola dan membuat keputusan keuangan dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi pada kestabilan sistem keuangan dan dapat mengurangi kerentanan pada sistem keuangan di Indonesia.

Literasi keuangan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan usaha pada pengusaha mikro, dimana literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kemampuan dalam membuat keputusan keuangan dan kesejahteraan rumah tangga serta kelangsungan hidup bisnis (Fatoki, 2014). Aribawa dalam penelitiannya tahun 2016 pada UMKM kreatif di Jawa Tengah juga mengkonfirmasi bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha pada UMKM. Sedangkan literasi keuangan pada UKM itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu gender dan tingkat pendidikan (Amaliyah et al., 2015).

Literasi keuangan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi (Chen dan Volpe, 1998). Literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola dan melakukan perencanaan terhadap keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) literasi atau perencanaan keuangan adalah cara menjalani kehidupan saat ini sesuai dengan kemampuan keuangan (secara sederhana) dan merancang kehidupan masa depan yang lebih sejahtera. Lemahnya tingkat literasi keuangan seseorang dan kurangnya pengetahuan akan pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada penggunaan layanan jasa keuangan, hal ini disebabkan karena adanya hambatan akses ke lembaga keuangan, sehingga ini akan mempermudah seseorang untuk dipengaruhi oleh penyedia layanan produk keuangan lain yang tidak termasuk dalam lembaga keuangan resmi. Hal tersebut tentunya dapat menghambat proses pembangunan perekonomian negara.

Literasi keuangan merupakan kombinasi antara pemahaman konsumen atau investor terhadap produk dan konsep keuangan, serta kemampuan dan kepercayaan mereka untuk menghargai risiko dan peluang finansial, untuk membuat pilihan berdasarkan informasi, untuk mengetahui ke mana harus mencari bantuan dan mengambil tindakan efektif lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka (Siekci et al., 2013). Menurut Fatoki (2014) yang mengutip United States Agency for International Development (USAID, 2013) mendefinisikan pemilik atau pengelola UMKM yang mengetahui mengenai financial literacy sebagai “Seseorang

yang mengetahui pilihan pengelolaan keuangan yang paling sesuai untuk usahanya di berbagai tahap pertumbuhan, mengetahui dimana untuk mendapatkan produk dan layanan yang paling sesuai”. Oleh karena itu, literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber keuangan secara efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai financial literacy ini telah dilakukan oleh Lusimbo (2016), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun pemilik atau pengelola UKM memiliki debt management literacy tapi mereka kurang memahami pengaruh inflasi dan suku bunga pinjaman yang mereka pinjam serta tidak membandingkan syarat dan ketentuan sebelum membeli produk keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan keuangan mereka tentang kapan harus meminjam, berapa banyak dan dari siapa, sehingga mengarah pada kinerja bisnis yang kurang optimal. Selain itu penelitian dari Nyamboga (2014), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja UKM dipengaruhi oleh keterampilan terkait dengan pembukuan, pengelolaan kredit, dan penganggaran. Penelitian dari Fatoki (2014) yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh pemilik usaha mikro. Kemudian penelitian dari Siekei et al. (2013) yang menunjukkan bahwa pelatihan dalam analisis keuangan, penganggaran, dan manajemen kredit meningkatkan kinerja UKM. Serta penelitian dari Barte (2012) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengusaha memiliki tingkat *financial literacy* yang rendah seperti ditunjukkan dengan kurangnya catatan keuangan, kontrol keuntungan, dan kerugian, serta kurangnya praktik pada pengelolaan kas.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana mengembangkan model *Financial Literacy* untuk Peningkatan Kinerja dan Profitabilitas UMKM di Kota Malang?
- 1.2.2. Bagaimana tahap pengembangan model *Financial Literacy* untuk Peningkatan Kinerja dan Profitabilitas UMKM di Kota Malang?

1.2.3. Bagaimana hasil pengembangan model *Financial Literacy* untuk UMKM di Kota Malang?

1.3. Tujuan Pengembangan

1.3.1. Mengembangkan model pengembangan *Financial Literacy* untuk UMKM di Kota Malang

1.3.2. Mendeskripsikan tahap pengembangan model pengembangan *Financial Literacy* untuk UMKM di Kota Malang

1.3.3. Menghasilkan pengembangan model *Financial Literacy* untuk UMKM di Kota Malang

1.4. Manfaat Pengembangan

1.4.1. Membantu UMKM Kota Malang dalam memahami literasi keuangan guna mengatasi permasalahan yang ada pada di bidang keuangan.

1.4.2. Membantu UMKM Kota Malang dalam meningkatkan literasi keuangan untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitas.